



## Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat RT 04 Kampung Baru Balikpapan di Masa Pandemic COVID-19

Nur Fauzia<sup>a,1\*</sup>, Suryaningsi<sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> melanipturihapsari09@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

Received: 10 November 2022;

Revised: 19 November 2022;

Accepted: 26 November 2022.

Kata-kata kunci:

Nilai Pancasila;

Masyarakat;

Covid-19.

Covid-19 tersebar di Indonesia dan membuat pemerintah Indonesia bertindak secara tegas dengan membuat pertauran, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Tidak hanya itu terkait adanya pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan program vaksinasi juga dilakukan dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penanganan dan pencegahan Covid-19 berkaitan pada perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dalam mematuhi segala bentuk kebijakan penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dari kesadaran masyarakat RT. 04 Kelurahan baru tengah terhadap upaya menanggulangi Covid-19. Kesadaran masyarakat terbentuk dari adanya kesadaran untuk melindungi diri dan keluarga, pengetahuan dan pemahaman terhadap Covid-19, pengalaman dan faktor internal maupun eksternal. Nilai-Nilai Pancasila akan memberikan landasan untuk menetapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan kepatuhan masyarakat sehingga terbentuk kesinambungan yang melahirkan dampak positif terutama dalam memutus rantai penularan Covid-19 serta dalam menghadapi kehidupan baru masyarakat Indonesia saat ini.

ABSTRACT

Keywords:

Pancasila Value;

Society;

Covid-19.

**Implementation of Pancasila Values in the Community of RT 04 Kampung Baru Balikpapan during the COVID-19 Pandemic.** Covid-19 spread in Indonesia and made the Indonesian government act decisively by making regulations, namely implementing health protocols. Not only that, it is related to the implementation of restrictions on community activities and the vaccination program is also carried out in the context of tackling the Covid-19 pandemic. Based on this, it encourages researchers to find out that there is public awareness in carrying out the handling and prevention of Covid-19 related to the embodiment of the noble values of Pancasila which are used as the nation's way of life in complying with all forms of policies for handling Covid-19. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that aims to describe the background of the RT community awareness. 04 The new Kelurahan is in the midst of efforts to tackle Covid-19. Public awareness is formed from awareness to protect oneself and family, knowledge and understanding of Covid-19, experience and internal and external factors. The values of Pancasila will provide a basis for establishing policies for handling the Covid-19 pandemic and public compliance so that continuity is formed which creates a positive impact, especially in breaking the chain of transmission of Covid-19 and in facing the new life of the Indonesian people today.

**Copyright © 2023 (Nur Fauzia & Suryaningsi). All Right Reserved**

How to Cite : Fauzia, N., & Suryaningsi, S. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat RT 04 Kampung Baru Balikpapan di Masa Pandemic COVID-19. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(4), 136–142. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i12.1377>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Penyebaran virus *corona* hingga saat ini di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, masih mengkhawatirkan. Jumlah kasus yang masih bertambah dan banyaknya aktivitas yang tertunda membuat keresahan di dalam masyarakat. Normal baru yang saat ini masih kita lakukan mengharuskan semua sektor di berbagai bidang untuk dapat beradaptasi pada masa pandemi Covid-19. Terkhusus sektor kesehatan yang menjadi acuan pertama dalam menjalankan kehidupan normal baru tersebut. Penyebaran infeksi penyakit Covid-19 hanya dengan melalui percikan lendir kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit dan keluar pada saat batuk atau bersin, menyentuh benda atau barang dari seseorang yang terinfeksi dan hubungan kontak langsung, membuat kita perlu untuk selalu mewaspadaikan akan mudahnya tertular infeksi virus *corona*.(Suryaningsi, 2020)

Penyebaran virus yang begitu cepat membuat pemerintah segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, mulai dari pelacakan pada orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, dan melakukan karantina atau pembatasan kegiatan di luar rumah kepada masyarakat yang sehat agar tidak tertular virus *corona*.

Pemerintah juga membuat kebijakan sebagai langkah awal untuk memutus rantai penularan penyakit Covid-19, yaitu melaksanakan protokol kesehatan berupa anjuran menggunakan masker yang sesuai standar kesehatan, mengatur jarak antar orang, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir setelah menyentuh barang umum dan membersihkan diri setelah melakukan kegiatan di luar rumah. Kondisi kedaruratan terhadap dampak akibat penularan penyakit ini pemerintah telah menetapkan virus *corona* (Covid 19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Samudro & Madjid, 2020).

Tidak cukup hanya setiap perilaku individu, mengingat masih terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah melakukan pengetatan protokol kesehatan dengan mengurangi mobilitas di luar rumah dan menjauhi kerumunan seperti kebijakan yang saat ini masih digiatkan, yakni PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan menutup tempat-tempat umum ataupun penutupan jalan raya pada batas waktu tertentu. Hingga saat ini pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh disertai dengan pola hidup sehat dan bersih. Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 sehingga pandemi ini dapat selesai dan kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya.(Lorensius et al., 2021)

Pemberian pelayanan kesehatan masih terus dilakukan oleh penyelenggara kesehatan, sesuai dengan hukum kesehatan bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan. Dengan begitu pemerintah memberikan penanganan secara terstruktur dengan membentuk lembaga terkait mengenai perkembangan kasus Covid-19. Maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 pada 13 Maret 2020 dibentuknya Lembaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat luas sehingga dapat mengetahui perkembangan dan penanganan Covid-19. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. (Majid, 2020)

Optimalisasi penanganan Covid-19 oleh pemerintah saat ini telah masuk pada tahap pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh setiap individu. Presiden Indonesia menegaskan bahwa vaksin Covid-19 diberikan secara gratis atau ditanggung oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan yang telah dijamin konstitusi dan wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.(Lorensius et al., 2021).

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dari kesadaran masyarakat RT. 04 kelurahan baru tengah terhadap berbagai upaya percepatan penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah, seperti kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan dan juga mengenai kebijakan peraturan penanganan Covid-19.. Penelitian dilakukan di sekitar tempat tinggal peneliti pada wilayah Kecamatan Tenggarong, yaitu terkhusus di RT. 04 kelurahan baru tengah. Dari Kelurahan tersebut peneliti hanya mengambil target tertentu pada RT.04 yang mana peneliti telah tinggal pada kurun waktu yang lama di lokasi penelitian tersebut. Jumlah responden yang diwawancarai sebelumnya tidak ditentukan peneliti, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan hasil penelitian serta dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan waktu dan tenaga. Responden yang dipilih oleh peneliti tentu yang memiliki pengetahuan terkait dengan penelitian yang dikaji. Hasil analisis tersebut yang akan melengkapi hasil umum dan digunakan sebagai data sekunder sehingga dapat mendeskripsikan hasil dari data primer tersebut. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) yang menjadi acuan peneliti untuk mendapatkan jawaban utama dalam penelitian ini. Melalui wawancara mendalam, peneliti kemudian membahas terkait informasi mengenai pengetahuan, kesadaran, kepatuhan, pengalaman masyarakat maupun faktor internal dan eksternal, sehingga dapat diketahui lebih mendalam dan rinci adanya keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya dalam suatu masalah yang dapat diperoleh secara lebih lengkap.

## Hasil dan Pembahasan

Kelurahan baru tengah menjadi salah satu kelurahan yang terdampak dari sisi kasus pasien positif Covid-19 yang cukup tinggi dari rata-rata keseluruhan kelurahan yang terdapat pada kawasan Kecamatan Balikpapan barat. Dari data yang didapatkan melalui media sosial resmi Dinas Kesehatan Balikpapan, dapat kita ketahui untuk Kecamatan baru tengah termasuk yang masih berlangsungnya klaster aktif dari perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19 pada bulan Desember 2020 hingga sekitar bulan September 2021, namun pada bulan Oktober 2021 Kecamatan baru tengah mulai menunjukkan penurunan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Dari klaster aktif tersebut, Kecamatan baru tengah masuk pada zona merah yang cukup lama terutama pada saat pertengahan perjalanan pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun per bulan Oktober 2021 hingga bulan Desember 2021, Kecamatan baru tengah telah masuk pada zona orange dengan kurang dari 5 kasus aktif atau pun pada beberapa waktu tidak ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Balikpapan akhirnya turun level, dari sebelumnya level 4 ke level 2. Kendati begitu, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud meminta agar masyarakat tak lengah..Wali Kota juga mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan bagi seluruh warga Kota Balikpapan tentang kondisi pandemik di kota Balikpapan. Dalam surat tersebut, selain menyampaikan Terima kasih pada stakeholder dan warga, karena kota Balikpapan telah berhasil turun level PPKM, ia juga meminta masyarakat berhati-hati dan waspada.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan melaksanakan Kick Off Vaksinasi Anak usia 6-11 tahun Rabu (15/12/2021) di Sentra Vaksinasi BSSC Dome. Nantinya ada 8 orang siswa yang akan divaksin secara simbolis.Para penerima vaksin adalah pelajar SDN 13 dan SDN 14 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Acara akan dibuka oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud sekira pukul 08.00 Wita.Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, Vaksin anak usia 6-11 tahun ini mengikuti arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Di Indonesia kick off vaksinasi telah dilaksanakan pada hari ini (14/12/2021) di tiga daerah, Jakarta, Banten dan Depok.

Berdasarkan hasil pengamatan dari sikap dan pola perilaku masyarakat yang terbentuk terhadap kebijakan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan yang membawa dampak baik tidak hanya

bagi diri sendiri, namun mencegah orang lain untuk tertular virus *corona*. Dapat kita kembali menghayati pengetahuan dan motivasi yang timbul terkait pada peran serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang mana mempunyai lima dasar dan mengandung makna yang sangat berarti bagi kehidupan bernegara masyarakat Indonesia seluruhnya. Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan nilai-nilai bagi kita dan petunjuk serta peran dasar filosofi dalam menghayati makna tersebut. Penghayatan yang dimaksud dapat kita renungkan dari sila-sila Pancasila dalam konteks menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Pancasila dalam rumusan sila-silanya telah memberikan nilai-nilai luhur yang mendasar terkait konsep hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan baik sesama masyarakat, pentingnya menjaga keutuhan bangsa, mematuhi peraturan pemerintah, kehidupan bersosial negara, dan terkait manusia secara utuh dan komprehensif.

Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna adanya keyakinan di dalam diri masyarakat akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Melihat kejadian pandemi Covid-19 ini, kita menyadari adanya sebuah relasi atau hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan alam semesta. Agama sebagai pedoman hidup manusia membawa nilai keimanan dan taqwa terhadap takdir Tuhan, manusia dapat memiliki rencana namun hasil akhir berada pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Pandemi Covid 19 menjadi salah satu bagian dari ujian dalam kehidupan manusia secara keseluruhan yang membuat kita menyadarkan tentang kekuasaan dan kekuatan Tuhan hanya dengan suatu virus yang bahkan kecilnya tidak mampu untuk dilihat secara kasat mata, namun dapat memberikan kejadian luar biasa di seluruh dunia. Nilai religius harus dapat ditingkatkan kuat pada masa-masa seperti ini dengan meningkatkan rasa syukur dan sabar. Kita dapat memaknai semua hal dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa juga tidak terlepas dari kesalahan perilaku manusia dengan alam sekitar yang tidak menunjukkan hubungan ekosistem yang baik dan seimbang. Kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang beragama tentu harus dapat menyikapi pandemi Covid-19 dengan dilandasi nilai spiritual dan kecerdasan ekologis. Implementasi dari moderasi beragama dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar dan tawakal manusia, seperti pada pembatasan melakukan ibadah berjamaah di tempat peribadatan, namun tidak membuat kita meninggalkan ibadah tersebut. Manusia beragama hendaknya dapat meningkatkan kedisiplinan dalam kehidupan normal baru, sehingga tidak melupakan konteks keimanan dan manusia bersosial.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab yang memiliki nilai kesopanan dan nilai santun yang harus diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia bersosial. Setiap manusia telah dilengkapi dengan rasa, pemikiran, karsa, kalbu dan cipta. Melalui hal tersebut, manusia dalam menjalani kehidupan, membangun budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk kemudian bersikap dan bertingkah laku sesuai adab dan norma di masyarakat. Pada situasi pandemi Covid-19 ini tentu aspek kemanusiaan dapat dirasakan pada sisi kesehatan, ekonomi masyarakat yang mana mereka pada setiap harinya mencari penghidupan di luar rumah, namun adanya pembatasan sosial membuat mereka harus menunda untuk bekerja secara total, kegiatan bersosial, kegiatan agama, penegakan hukum, pelestarian budaya dan lainnya yang kemudian menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan hubungan sesama manusia yang berakhir pada rasa kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk dapat hidup berdampingan dengan rasa saling menyayangi sesama rakyat Indonesia. Semua masyarakat haruslah mendapatkan hak perlindungan dan bantuan yang adil dari pemerintah. Di saat pandemic Covid-19 ini empati, simpati, peduli dan tanggung jawab kemanusiaan sangat diuji untuk membentuk satu kesadaran masyarakat bahwa kita tidak hidup sendiri dan tidak mungkin hidup sendiri, namun memiliki kewajiban untuk dapat saling menjaga satu sama lain dalam memutus rantai penularan virus *corona*. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif (bersama). Masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan menaati terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Kesehatan sebagai hak asasi setiap manusia

untuk dapat hidup sejahtera tanpa menderita penyakit dapat diimplementasikan dengan menjaga diri dan orang lain dari penyebaran virus *corona*, dengan meningkatkan sistem kesehatan masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang tepat sasaran dan tidak menyulitkan masyarakat untuk memperoleh kesehatan dirinya. Kita pun dapat membawa pada ruang lingkup masyarakat di tingkat kelurahan untuk membentuk suatu gerakan hidup bersih dan sehat dalam menanggulangi penularan virus corona yang begitu cepat.

Persatuan Indonesia, memberikan karakteristik tentang kekuatan pada pemahaman kebangsaan Indonesia dan didalamnya terkandung nilai nasionalisme. Perasaan satu sebagai bangsa, satu sebagai warga negara Indonesia, dengan tumbuhnya rasa saling mencintai sesama masyarakat, cinta pada tanah air dan kehidupan berbangsa dapat ditumbuhkan dari sikap nasionalisme. Di sisi lain, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong-royong juga mendasari kekuatan persatuan Indonesia dan semakin menguatkan keutuhan pada dasar negara. Dalam konteks situasi pandemi Covid-19 ini perlu untuk kita merealisasikan sikap nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong-royong tersebut dalam menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan berupa materil maupun non-materil serta doa pada saudara-saudara kita. Melepas sifat mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan hak orang lain, namun haruslah dapat menghormati sesama masyarakat, seperti yang dapat kita ketahui terkait pengorbanan para tenaga medis, relawan dan lain-lainnya. Menciptakan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan bersama melakukan gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kesatuan inilah yang kemudian dapat mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagi rasa, dan bertindak tanpa melihat perbedaan, seperti ras, suku dan agama. Pandemi Covid-19 dapat menumbuhkan kebersamaan dalam menghadapi bencana. Pemerintah melakukan desentralisasi terkait kebijakan penanganan Covid-19, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah yang memiliki kasus aktif Covid-19 (Gultom, 2022).

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini memberikan makna adanya sifat kekuasaan yang bertanggung jawab dan bijaksana yang diamanahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap rakyat Indonesia, dan mencintai kebenaran dan kejujuran dalam kerangka negara berpedoman hukum berkedaulatan rakyat. Esensi dari sila ke empat, terkait kebijaksanaan pemimpin dan elite politik dalam menghasilkan kebijakan negara yang tidak dibuat secara asal atau adanya kepentingan pribadi, namun kebijaksanaan dan peran penting pemimpin haruslah berorientasi pada kepentingan rakyat terutama dalam menangani pandemi Covid-19 dan dari kebijakan tersebut dapat kita lihat dampak positif atau pun negatif terkait kebijakan yang ditetapkan terhadap keberlangsungan kehidupan rakyat. Tidak boleh pemangku kebijakan memperoleh suatu keuntungan untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan kekuasaannya dengan tindakan yang tidak bermoral, serta otoriter di tengah kesulitan rakyatnya. Demokrasi juga berkaitan erat terhadap sila keempat Pancasila. Makna demokrasi dalam upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 ini yang mana semua rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan normal baru secara kondusif tidak hanya pemerintah saja yang mengambil peran, namun peran masyarakat yang luas pun menjadi unsur yang sangat penting. Setiap putusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya merupakan hasil dari upaya musyawarah dan kesepakatan bersama yang selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan ataupun kebijakan hukum bersama demi kepentingan bangsa ini. Kebijakan terkait aturan dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu memperhatikan kondisi dan situasi dari semua sektor terkait yang terdampak dari pandemi ini sehingga pemerintah harus selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan di masyarakat luas supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyiratkan keadilan terhadap segala sesuatu yang berkaitan pada hak dan kewajiban yang berlaku bagi seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Keadilan ini juga harus berlandaskan pada sila-sila lainnya. Dalam konteks ini, sikap



memberikan keadilan kepada sesama warga negara, menghormati hak orang lain, sikap saling menolong, menghargai perbedaan yang ada dan melakukan pekerjaan atau peran aktif untuk membantu kepentingan bersama yang dilakukan terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Keadilan bukan bermakna semua harus sama, namun keadilan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai keadaan, secara proposional dan tidak melanggar hukum hak dan kewajiban seseorang. Sehingga keadilan dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan sesuai pada bidang dan bagiannya. Seseorang yang memiliki jabatan dan yang tidak memiliki jabatan, keduanya memiliki hak asasi dan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan perlindungan yang sama dari pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan yang diberikan pemerintah kepada warga negara dengan tidak diperlakukan secara diskriminasi dan dibedakan satu sama lain. Contoh lainnya dengan memberikan akses serta sarana prasarana kepada daerah pedalaman yang jauh dari kota, sehingga semua infrastruktur tidak berpusat hanya di kota besar tertentu, namun semua warga negara Indonesia dapat merasakan dan menikmati hak mereka dalam memperoleh keadilan tersebut.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak dari sisi pekerjaan dan penghasilan mereka yang menurun, terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang kaki lima, pedagang sembako, buruh, pelaku usaha kecil menengah, dan masyarakat yang memperoleh penghasilan per harinya. Sehingga jika mereka tidak bekerja, maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat dirasakan bagi mereka yang bekerja di luar rumah dan usaha yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti rumah makan, *café*, warung dan sebagainya.

Kebijakan ini memengaruhi penghasilan dan upah mereka, karena harus menutup usaha sementara dan membatasi kapasitas pelanggan yang datang ke usaha mereka, ataupun bagi masyarakat yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu untuk menggaji seluruh buruh dan karyawan sebab pendapatan perusahaan pun yang juga menurun. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak dari adanya kebijakan selama pandemi Covid-19, namun yang menjadi permasalahan ialah pada sasaran yang dituju haruslah tepat, didapatkan fakta di lapangan bahwa masih banyak bantuan dari pemerintah tersebut yang salah sasaran sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya keadaan ekonomi yang seimbang. Maka dari sinilah pemerintah pusat maupun daerah dan perangkat di bawahnya yang terkait untuk memerhatikan ketepatan sasaran dari bantuan-bantuan tersebut sehingga dapat mewujudkan bentuk keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **Simpulan**

Berdasarkan penjabaran covid-19 di atas dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa kesadaran, pengetahuan yang membentuk pemahaman, pengalaman dari kejadian yang pernah menimpa diri sendiri atau pun orang lain, manfaat yang dirasakan, dan faktor pendukung lain, baik internal maupun eksternal menjadi suatu hal yang mendasari terbentuknya pola perilaku masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Selanjutnya perilaku tersebut dikaitkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut yang bersifat universal atau merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa untuk menyelesaikan masalah yang kemudian dijadikan landasan untuk pembentukan norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral, serta kebijakan terhadap masalah yang dihadapi. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber hukum dan nilai bagi tata tertib hukum di Indonesia yang juga sebagai sumber norma moral dan perilaku bagi penyelenggaraan ketatanegaraan serta pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama dalam masa pandemi Covid-19 saat ini dan negara Indonesia pun telah memasuki kehidupan *new normal* dengan menghayati kembali

makna pada setiap sila-sila Pancasila, seperti meningkatkan keimanan terhadap masalah yang dihadapi dengan mempercayai adanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan rasa kemanusiaan untuk saling peduli terhadap sesama masyarakat, semakin cinta terhadap tanah air dengan menjaga keutuhan negara dan menghargai perbedaan yang ada, menjauhi sikap mementingkan diri sendiri dalam menentukan kebijakan untuk masyarakat luas, namun dengan upaya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan melihat keadaan yang sesungguhnya di masyarakat, serta memperhatikan keadilan dan kesejahteraan antara hak dan kewajiban seluruh masyarakat dalam mendapatkan berbagai aspek, seperti penghidupan yang layak, kemudahan mendapatkan pelayanan kebijakan hukum, kesehatan, dan sosial.

## Referensi

- Dermawan, M. S., & Nurchotimah, A. S. I. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila dalam menanggulangi covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 426-431.
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Strengthening Pancasila Values During the Covid-19 Pandemic. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2411-2417.
- Fathimah, A. F., Al-Islami, M. F., Gustriani, T., Rahmi, H. A., Gunawan, I., Agung, I. M., & Husni, D. (2021). Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah Selama Pandemi: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi Indigenus. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 15-22.
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174-178.
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, Andri Fransiskus (2022) Jembatan Ilmu yang Rapuh. *Kompas* (6). ISSN 0215-207X
- Gultom, Andri, "Bias Universum pada Filsafat," *Researchgate*, 2022<[https://www.researchgate.net/publication/359874787\\_Bias\\_Universum\\_pada\\_Filsafat](https://www.researchgate.net/publication/359874787_Bias_Universum_pada_Filsafat)>
- Hadi, S. (2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Perencanaan Percepatan Penanganan dan Pemulihan Terdampak Pandemi Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 22-32.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Laporan Provinsi Kalimantan Timur (RISKESDAS) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
- Lemhannas RI (2020), Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi Pancasila
- Lestari, E. (2021). Upaya Optimalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Sebuah Tinjauan Literatur. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(4), 293-303.
- Mushidah, & Muliawati, R. (2021). Pengetahuan dan Sikap dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pedagang UMKM. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11(1), 35-42.
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37-52.
- Sukur, M. H., Kurniadi, B., dkk. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*. 1(1) : 3-10.
- Widiyanti, R. A. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pancasila dalam dan Pasca Covid 19 Demi Menyongsong Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2).